



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah antara ;

Diat Supriadi bin Ukat, sukabumi, 18 Juni 1980 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Limbangan RT.001 RW. 002 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dede Sumiati binti Udin, sukabumi, 16 April 1985 (umur 32 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Limbangan RT.001 RW. 002 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 09 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Cbd Tanggal 09 Mei 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2014 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ukat dan Engkos dengan mas kawin

Halaman 1 dari 5 Pntp.No : 186Pdt.P/2017/PA.Cbd



berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Asep Saparudin, sukabumi 17 Juni 1999
 - b. Jamaludin, sukabumi 04 Nopember 2002
 - c. Rina Nuraeni, sukabumi 15 Juli 2004
 - d. Rizky Al-Ayubi, sukabumi 15 April 2015;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Pnpt.No : 186Pdt.P/2017/PA.Cbd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Diat Supriadi bin Ukat) dan Pemohon II (Dede Sumiati binti Udin);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Diat Supriadi bin Ukat) dan Pemohon II (Dede Sumiati binti Udin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Cbd tanggal 09 Mei 2017, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 16 Mei 2017 dan tertanggal 24 Mei 2017 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan

Halaman 3 dari 5 Pnpt.No : 186Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Cbd tanggal 09 Mei 2017 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017, sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Parakansalak, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Irman Fadly, S. Ag** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Ade Rinayanti, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa kehadiran para Pemohon;

Hakim,

ttd

Irman Fadly, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S. Ag

Halaman 4 dari 5 Pntp.No : 186Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 181.000,-**
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Drs. E. Arifudin

Halaman 5 dari 5 Pntp.No : 186Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)